

PEMBERDAYAAN KELOMPOK USAHA KRIPIK OLEH PEMERINTAH DESA DI DESA PUTRAPINGGAN KECAMATAN KALIPUCANG KABUPATEN PANGANDARAN

Oleh

BALKIAN

Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan

FISIP Universitas Galuh Ciamis

Abstrak

Latar belakang penelitian ini adalah Pemerintah Desa kurang berusaha meningkatkan pengetahuan teknis kelompok usaha keripik melalui pendidikan khusus, sehingga kelompok usaha keripik melakukan kegiatannya secara manual. Contoh dalam pembuatan keripik masih menggunakan alat-alat tradisional, Pemerintah Desa kurang berusaha melakukan perbaikan manajemen kelompok usaha keripik, sehingga manajemen kelompok usaha keripik belum memadai. Pemerintah Desa kurang berusaha meningkatkan optimalisasi peluang bisnis kelompok usaha keripik, sehingga proses penjualan masih bersifat lokal. Rumusan masalah dalam penelitian (1) Bagaimana pemberdayaan kelompok usaha keripik oleh Pemerintah Desa?, (2) Hambatan apa yang dihadapi Pemerintah Desa dalam pemberdayaan kelompok usaha keripik?, (3) Upaya apa yang dilakukan Pemerintah Desa dalam pemberdayaan kelompok usaha keripik? Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis, dengan sampel penelitian berjumlah 13 orang perangkat desa dan 10 orang anggota kelompok. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut: Pemberdayaan kelompok usaha keripik oleh Pemerintah Desa Putrapinggan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Hambatan-hambatan yang dihadapi pihak pemerintah desa dalam Pemberdayaan kelompok usaha keripik adalah: Ketersediaan anggaran, SDM atau pegawai, sarana prasarana, minat perhatian dan sebagainya. Hasil observasi menunjukkan bahwa koperasi unit desa sebagai sumber keuangan yang memberikan pinjaman kepada kelompok usaha, tidak mampu memenuhi permintaan seluruh kelompok. Upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah: (1) Dilakukannya pengajuan anggaran; (2) Diikutsertakan pada kegiatan diklat, pendidikan latihan dan bimbingan teknis, (3) Mendatangkan narasumber dari luar dinas melalui kerjasama atau koordinasi dengan Pemerintah pusat agar diikutsertakan dalam pelatihan yang dilaksanakan dan dibiayai oleh pusat; (4) Adanya pengajuan alokasi biaya. Sementara hasil wawancara diketahui keempat hal tersebut telah dilaksanakan

Kata Kunci: *Pemberdayaan, Kelompok Usaha Kripik*

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional, pemerintah memberikan perhatian yang sebesar-besarnya pada pembangunan di pedesaan. Perhatian yang besar terhadap pedesaan itu didasarkan pada kenyataan bahwa desa merupakan tempat berdirinya sebagian besar rakyat Indonesia. Kedudukan desa dan masyarakat desa merupakan dasar landasan kehidupan bangsa dan negara Indonesia.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum terkecil yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh negara. Pembangunan pedesaan selayaknya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Pemberdayaan masyarakat pedesaan dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat, dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh. Pembangunan pedesaan bersifat multiaspek, oleh karena itu perlu keterkaitan dengan bidang sektor dan aspek di luar pedesaan sehingga dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi pembangunan nasional.

Untuk mewujudkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Pada tatanan pemerintahan diperlukan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggung jawab, dan demokrasi, sedangkan pada tatanan masyarakat perlu dikembangkan mekanisme yang memberikan

MODERAT

Modern dan Demokratis

peluang peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama.

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi desa, pengembangan lembaga keuangan desa, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya.

Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat seharusnya mampu berperan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih berkualitas. Pembentukan dan perubahan perilaku tersebut, baik dalam dimensi sektoral yakni dalam seluruh aspek atau sektor-sektor kehidupan manusia; dimensi kemasyarakatan yang meliputi jangkauan kesejahteraan dari materiil hingga non materiil; dimensi waktu dan kualitas yakni jangka pendek hingga jangka panjang dan peningkatan kemampuan dan kualitas untuk pelayanannya, serta dimensi sasaran yakni dapat menjangkau dari seluruh strata masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tidak lain adalah memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat agar mampu menggali potensi dirinya dan berani bertindak memperbaiki kualitas hidupnya, melalui cara antara lain dengan pendidikan untuk penyadaran dan pempampuan diri mereka.

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah strategi yang dilakukan untuk melakukan kemandirian sosial ekonomi masyarakat dalam jangka panjang. Sasaran yang dituju adalah masyarakat miskin yang tidak memiliki keberdayaan secara ekonomi, sosial, budaya dan politik.

Menurut Sumodiningrat (Mardikanto, 2013:53) disebutkan bahwa:

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mendirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh

kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.

Lebih lanjut Mubyarto dalam Mardikanto (2013:53) menekankan bahwa: "Pemberdayaan terkait erat dengan pemberdayaan ekonomi rakyat". Adapun pemberdayaan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah pemberdayaan sektor informal, khususnya kelompok ekonomi kripik di Desa Putrapinggian Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran, sebagai bagian dari masyarakat yang membutuhkan pembangunan/pengelolaan tersendiri dari pihak pemerintah yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya yang mereka miliki yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan pendapatan/profit usaha sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap penerimaan pendapatan daerah.

Di dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Kepala Desa memiliki tugas dan kewajiban antara lain memimpin penyelenggaraan pemerintah desa, membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat desa, mewakili di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya, mengajukan rancangan peraturan desa, bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkannya sebagai peraturan desa, menjaga kelestarian adat istiadat yang ada dan berkembang di desa. Untuk menjalankan tugas dan kewajiban tersebut, kepala desa bertanggungjawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pemerintah Desa sebagai lembaga pemerintah tertinggi di lingkup pedesaan memiliki peran sentral dalam memberdayakan ekonomi masyarakat desa, salah satunya adalah pemberdayaan kelompok ekonomi yang ada di desa. Untuk itu Pemerintah Desa dituntut untuk dapat meningkatkan perannya dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat desa.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di Desa Putrapinggian Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran di ketahui terdapat 10 kelompok usaha kripik. Dari 10 kelompok tersebut hanya 3 kelompok yang sudah berjalan. Adapun yang lainnya masih belum berjalan. Lebih jelasnya tampak sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel
Keberadaan Kelompok Usaha Kripik

No.	Nama kelompok	Jumlah anggota		
			Berjalan	Tidak berjalan
1	Sederhana	12 orang	√	
2	Iti kurih	14 orang	√	
3	Tunas karya	6 orang		√
4	Doa Ibu	7 orang		√
5	Rodho Ilahi	8 orang		√
6	Mekar sempurna	9 orang		√
7	Kevin Collection	12 orang		√
8	Sehati	15 orang	√	
9	Harapan karya	10 orang		√
10	PKK	22 orang		√

Sumber:

Desa Putrapinggian, Kecamatan Kalipucang

Berdasarkan tabel di atas, diketahui hanya tiga kelompok usaha kripik yang sudah berjalan yaitu kelompok keripik sederhana, iti kurih dan sehati. Sedangkan tujuh kelompok lainnya belum berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Desa kurang mampu memberdayakan kelompok usaha kripik. Hal ini tampak dari adanya indikasi-indikasi berikut.

Pemerintah Desa kurang berusaha meningkatkan pengetahuan teknis kelompok usaha keripik melalui pendidikan khusus, sehingga kelompok usaha keripik melakukan kegiatannya secara manual. Contoh dalam pembuatan keripik masih menggunakan alat-alat tradisional

Pemerintah Desa kurang berusaha melakukan perbaikan manajemen kelompok usaha keripik, sehingga manajemen kelompok usaha keripik belum memadai. Seperti tidak adanya jobdeskripsi untuk masing-masing ketua.

Pemerintah Desa kurang berusaha meningkatkan optimasi peluang bisnis kelompok usaha keripik, sehingga proses penjualan masih bersifat lokal. Seperti penjualan masih menjual kripiknya di sekitar Desa Putrapinggian saja.

Berdasar latar belakang penelitian di atas, selanjutnya penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemberdayaan kelompok usaha keripik oleh Pemerintah Desa di Desa Putrapinggian Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran?
2. Hambatan apa yang dihadapi Pemerintah Desa dalam pemberdayaan kelompok usaha keripik di Desa Putrapinggian Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran?
3. Upaya apa yang dilakukan Pemerintah Desa dalam pemberdayaan kelompok usaha keripik di Desa Putrapinggian Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran?

LANDASAN TEORITIS

Pemberdayaan

Menurut Prijono dan Pranaka dalam Sedarmayanti (2014:79) mengatakan bahwa:

Konsep pemberdayaan mungkin dapat dipandang sebagai bagian/sejiwa dengan aliran-aliran pada paruh kedua abad ke-20, yang dewasa ini banyak dikenal sebagai aliran post modernisme, dengan titik berat sikap dan pendapat yang orientasinya adalah anti sistem, anti struktur dan anti determinisme, yang diaplikasikan kepada dunia kekuasaan.

Sementara itu Paul dalam Prijono dan Pranarka (1996:44-45) menyatakan bahwa:

Pemberdayaan berarti: pembagian kekuasaan yang adil (*equitable sharing of power*) sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan. Dan perspektif lingkungan, pemberdayaan mengacu pada pengamanan akses terhadap sumber daya alami dan pengelolaannya secara berkelanjutan.

Dalam kaitan ini, Bennis and Mische (1995: 45) menjelaskan bahwa:

Pemberdayaan berarti menghilangkan batasan birokratis yang mengkotakkan orang dan membuat mereka menggunakan seefektif mungkin keterampilan, pengalaman, energi dan ambisinya. Ini berarti memperkenankan mereka untuk mengembangkan suatu perasaan memiliki bagian-bagian dan proses, khususnya yang menjadi tanggung jawab mereka. Sementara pada waktu yang sama menuntut mereka menerima suatu

bagian tanggung jawab dan kepemilikan yang lebih luas dan keseluruhan proses.

Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa dalam pemberdayaan, dapat mendorong terjadinya inisiatif dan respon, sehingga seluruh masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan cepat dan fleksibel.

Pembinaan Usaha Kelompok

Pembinaan usaha menjadi suatu upaya penting dalam setiap pemberdayaan, sebab, Bina Manusia yang tanpa memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan (ekonomi dan atau ekonomi) tidak akan laku, dan bahkan menambah kekecewaan. Sebaliknya, hanya Bina Manusia yang mampu (dalam waktu dekat/cepat) memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan (ekonomi dan atau ekonomi) yang akan laku atau memperoleh dukungan dalam bentuk partisipasi masyarakat. Dalam proses pemberdayaan Mardikanto dan Soebianto (2013:225), sebagai berikut.

1. Peningkatan pengetahuan teknis, utamanya untuk meningkatkan produktivitas, perbaikan mutu dan nilai tambah produk
2. Perbaikan manajemen untuk meningkatkan efisiensi usaha, dan pengembangan jejaring kemitraan.
3. Pengembangan jiwa kewirausahaan terkait dengan optimasi peluang bisnis yang berbasis dan didukung oleh keunggulan lokal
4. Peningkatan aksesibilitas terhadap: modal, pasar, informasi
5. Advokasi kebijakan yang berpihak kepada pengembangan ekonomi rakyat.

UKM

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah jenis usaha yang paling banyak jumlahnya di Indonesia, tetapi saat ini batasan mengenai kriteria usaha kecil di Indonesia masih beragam. Pengertian kecil dalam usaha kecil bersifat relatif, sehingga perlu ada batasan yang dapat menimbulkan definisi-definisi usaha kecil dari berbagai segi.

Menurut Tohar (1999:2) definisi usaha kecil dari berbagai segi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan total asset.
Pengusaha kecil adalah pengusaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat membuka usaha.
- b. Berdasarkan total penjualan.
Pengusaha kecil adalah pengusaha yang memiliki hasil total penjualan bersih/tahun paling banyak Rp 1.000.000.000,-
- c. Berdasarkan status kepemilikan.
Pengusaha kecil adalah usaha berbentuk perseorangan yang bisa berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang didalamnya termasuk koperasi.

Menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), dalam (http://UKM.blogspot.com/2012/01/Usaha-kecil-menengah-dalam_11.html) tanggal akses 25 Maret 2015 menyebutkan bahwa Industri Kecil adalah industri perdagangan yang mempunyai tenaga kerja antara 5-19 orang.

METODE PENELITIAN

Direncanakan dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian berdasarkan metode deskriptif.

Data adalah seluruh informasi empiris dan dokumentatif yang diperoleh di lapangan sebagai pendukung ke arah konstruksi ilmu secara alamiah dan akademis. (Arikunto, 2010:115). Data penelitian adalah *Thinks knowing or assumed*, yang berarti bahwa data itu sesuatu yang diketahui atau dianggap

Sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh (Arikunto, 2010:172). Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah perangkat desa sebanyak 13 orang dan 10 orang masyarakat anggota kelompok usaha, sehingga total responden dalam penelitian ini sebanyak 23 orang. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen di Kantor Desa Putrappingan, dan buku literatur yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Teknik studi pustaka, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku dan literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Pemberdayaan Kelompok Usaha Kripik Oleh Pemerintah Desa
di Desa Putrapinggian Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran
BALKIAN

- 2) Studi Lapangan prosedur (langkah tempuh) yang ditempuh adalah sebagai berikut.
- a. Teknik Observasi
 - b. Teknik wawancara
- Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Adapun
- 1) Reduksi Data
 - 2) Penyajian Data
 - 3) Kesimpulan dan Verifikasi

PEMBAHASAN

Pemberdayaan Kelompok Usaha Kripik oleh Pemerintah Desa

Berdasarkan analisis terhadap hasil wawancara tentang pemberdayaan kelompok usaha kripik oleh pemerintah desa di Desa Putrapinggian Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran, dihasilkan beberapa hal sebagai berikut:

**TABEL
REKAPITULASI HASIL WAWANCARA**

No.	Sub variabel	Indikator	Tanggapan Responden		
1.	Pemberdayaan kelompok usaha kripik oleh Pemerintah Desa di Desa Putrapinggian Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran	Pemerintah Desa berusaha meningkatkan pengetahuan teknis kelompok usaha kripik melalui pendidikan khusus	Sebanyak 11 orang atau 47,82% yaitu informan no 01,02,04,05,06, 07,08,09, 10,11, 13 Menyatakan usaha pemerintah desa dilaksanakan melalui pendidikan	Sebanyak 8 orang atau 34,78 % yaitu informan no 14,15,16,18,20,21,23 Menyatakan usaha pemerintah desa dilaksanakan melalui pelatihan	Sebanyak orang atau 34,78 % yaitu informan no 3,12, dan 17 menyatakan usaha pemerintah desa melalui bimbingan, sosialisasi dan penyuluhan
2.		Pemerintah Desa berusaha meningkatkan produktivitas kelompok usaha kripik melalui pelatihan	Sebanyak 12 orang atau 52,17 % yaitu informan no 01,02,03,04,05,07 08,10,11, 19, 20, 23 Menyatakan usaha pemerintah desa dalam meningkatkan produktivitas kelompok usaha kripik melalui pelatihan	Sebanyak 9 orang atau 39,13% yaitu informan no 06, 09, 12, 13,14,15,16, 17, 18 menyatakan usaha pemerintah desa dalam meningkatkan produktivitas kelompok usaha kripik melalui BIMTEX	Sebanyak 2orang atau 8,6% yaitu informan no 21,22 melalui penyuluhan
3.		Pemerintah Desa berusaha meningkatkan	Sebanyak 23 orang atau 100 % yaitu informan no 1 sampai 23 Menyatakan usaha peningkatan mutu produk yang dihasilkan oleh kelompok usaha kripik selalu dilaksanakan		
4.		Pemerintah Desa berusaha meningkatkan nilai tambah produk	Sebanyak 23 orang atau 100% yaitu informan no 1 sampai 23 Menyatakan usaha		

MODERAT

Modern dan Demokratis

		kelompok usaha keripik melalui pelabelan yang menarik	meningkatkan nilai tambah produk kelompok usaha keripik melalui pelabelan yang menarik selalu dilaksanakan		
5.		Pemerintah Desa berusaha melakukan perbaikan manajemen kelompok usaha keripik.	Sebanyak 23 orang atau 100% yaitu informan no 1 sampai 23 Menyatakan usaha berusaha melakukan perbaikan manajemen kelompok usaha keripik selalu dilaksanakan		
6		Pemerintah desa berusaha untuk	Sebanyak 9 orang atau 39,13% yaitu informan no 01,02, 04, 12, 13, 20,21,22,23 Menyatakan usaha menciptakan efisiensi usaha kelompok usaha keripik melalui penanaman bahan baku	Sebanyak 10 orang atau 43,47% yaitu 03,05,06,07,08,09 10,11, 14, 15, informan no Menyatakan usaha menciptakan efisiensi usaha kelompok usaha keripik dengan menciptakan lapangan usaha baru sebagai penyedia bahan baku	Sebanyak 4 orang atau 17,39 % yaitu informan no 16,17,18,19, Menyatakan usaha untuk menciptakan efisiensi usaha kelompok usaha keripik melalui penanaman lahan kosong
7		Pemerintah Desa berusaha melakukan pengembangan jejaring kemitraan kelompok usaha keripik	Sebanyak 23 orang atau 100 % yaitu informan no 01- 23 Menyatakan usaha pemerintah desa dalam pengembangan jejaring kemitraan kelompok usaha keripik dilaksanakan melalui jejaring sosial		
8		Pemerintah Desa berusaha meningkatkan optimasi peluang bisnis kelompok usaha keripik	Sebanyak 23 orang atau 100 % yaitu informan no 01-23 Menyatakan usaha Pemerintah Desa berusaha meningkatkan optimasi peluang bisnis kelompok usaha keripik		

Pemberdayaan Kelompok Usaha Kripik Oleh Pemerintah Desa
di Desa Putrapinggian Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran
BALKIAN

9		Pemerintah Desa berusaha mendukung pengembangan kelompok usaha kripik melalui keunggulan lokal	23 orang atau 100 % yaitu informan no 01-23 Menyatakan usaha pemerintah Desa berusaha mendukung pengembangan kelompok usaha kripik melalui keunggulan lokal		
10		Pemerintah Desa meningkatkan aksesibilitas pemasaran kelompok usaha kripik.	Sebanyak 9 orang atau 39,13% yaitu informan no 01,02,03,04,05, 15,17, 22,23 pembukaan akses di onelinc	Sebanyak 12 orang atau 52,17% yaitu informan no 06,07,08,09,11,13 ,16, 18,19,20,21,22 Menyatakan usaha pemerintah desa berusaha untuk meningkatkan aksesibilitas pemasaran kelompok usaha kripik melalui pemasangan iklan	Sebanyak 2 orang atau 8,69% yaitu informan no10, dan 12 menyatakan desa berusaha untuk meningkatkan aksesibilitas pemasaran kelompok usaha kripik melalui ke warting, toko-ke toko serta memasarkannya di toko online
11		Pemerintah Desa meningkatkan pasar pemasaran kelompok usaha kripik	Sebanyak 11 orang atau 47,82% yaitu informan no 01,02, 03, 04,05,07,09,20,21,22 ,23 Menyatakan usaha Pemerintah Desa meningkatkan pasar pemasaran kelompok usaha kripik dengan membuka toko	Sebanyak 8 orang atau 34,78% yaitu informan no 06,08,10,11,12,13 ,14,15 Menyatakan usaha Pemerintah Desa meningkatkan pasar pemasaran kelompok usaha kripik dengan membuka akses ke luar daerah	Sebanyak 4, orang atau 17,39% yaitu informan no 16,17,18,19 Menyatakan usaha Pemerintah Desa meningkatkan pasar pemasaran kelompok usaha kripik melaksanakan akses onelinc
12		Pemerintah Desa mencari informasi kelompok usaha kripik	Sebanyak 4 orang atau 17,39% yaitu informan no 01,06,12,14 Menyatakan usaha melalui jaringan sosial media	Sebanyak 14 orang atau 60,68% yaitu informan no 02,03,04,05,07,08 ,09,10,11,13,15,1 6,17,18 Menyatakan usaha melalui pendekatan	Sebanyak 5 orang atau 21,73 % yaitu informan no 19,20,21,22,23 Menyatakan usaha melalui kerjasama dengan pengusaha lebih besar
13		Pemerintah Desa memberikan advokasi kebijakan yang berpihak pada ekonomi rakyat	Sebanyak 23 orang atau 100 % yaitu informan no 01 - 23 Menyatakan usaha memberikan advokasi kebijakan yang berpihak pada ekonomi rakyat		

14		Pemerintah Desa membuat kebijakan ekonomi pada masyarakat desa	Sebanyak 23 orang atau 100 % yaitu informan no 01 - 23 Menyatakan membuat kebijakan ekonomi pada masyarakat desa		
----	--	--	--	--	--

Hambatan yang Dihadapi Pemerintah Desa

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka pada umumnya hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok usaha keripik di Desa Putrappingan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran, adalah SDM, Sarana prasarana, kurang kebijakan, koordinasi, pengetahuan dan sebagainya sehingga masih banyak kelompok usaha yang tidak berkembang.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa semua aspek yang menjadi hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok usaha keripik di Desa Putrappingan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran, benar adanya sebab masih banyak SDM, Sarana prasarana, kurang kebijakan, koordinasi, pengetahuan yang menjadi penyebab banyak kelompok usaha yang tidak berkembang.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Desa dalam pemberdayaan kelompok usaha keripik

Untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi hambatan yang dihadapi pihak pemerintahan desa dalam pemberdayaan kelompok usaha keripik di Desa Putrappingan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran. Hasil wawancara tersebut, tampak sebagaimana deskripsi berikut.

1. Diikutsertakan pada kegiatan diklat, pendidikan latihan dan bimbingan teknis.
2. Merencanakan, menyusun dan mengusulkan anggaran untuk kegiatan-kegiatan pelatihan peningkatan SDM, dilakukan pelatihan dan sosialisasi yang berhubungan dengan meningkatkan produktivitas kelompok usaha keripik. Mengupayakan mencari dana dari tingkat Prov/pusat dan mendatangkan narasumber dari luar dinas.
3. mencari informasi mengenai pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh pusat maupun

daerah, berkoordinasi dan bekerjasama dengan Pemerintah Pusat.

4. Mengajukan penganggaran untuk terlaksana diklat, rekrutmen, pemberian motivasi dari Kepala desa.
5. Melakukan perbaikan manajemen kelompok usaha keripik adalah memberikan masukan dan pendampingan dalam membuat manajemen.
6. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah desa, guna mengatasi hambatan dalam berusaha untuk menciptakan efisiensi usaha kelompok usaha keripik dengan memberikan masukan untuk menyediakan bahan baku melalui pemanfaatan lahan kosong.
7. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah desa, guna mengatasi hambatan dalam berusaha untuk melakukan pengembangan jejaring kemitraan kelompok usaha keripik melalui pembukaan akses jejaring sosial, serta pembukaan akses dengan wilayah lain sebagai objek pemasaran.
8. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah desa guna mengatasi hambatan dalam berusaha untuk meningkatkan optimasi peluang bisnis kelompok usaha keripik, yaitu diikutsertakan pada kegiatan diklat, pendidikan latihan dan bimbingan teknis.
9. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah desa, guna mengatasi hambatan dalam berusaha untuk mendukung pengembangan kelompok usaha keripik melalui keunggulan lokal melalui pelatihan dengan pemberian pelatihan baik didalam desa maupun di luar desa adalah merencanakan, menyusun dan mengusulkan anggaran untuk kegiatan-kegiatan pelatihan peningkatan SDM, dilakukan pelatihan dan sosialisasi yang berhubungan dengan meningkatkan produktivitas kelompok usaha keripik. Mengupayakan mencari dana

dari tingkat Prov/pusat dan mendatangkan narasumber dari luar dinas.

10. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas pemerintah desa, guna mengatasi hambatan dalam berusaha untuk meningkatkan aksesibilitas pemasaran kelompok usaha kripik adalah mencari informasi mengenai pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh pusat maupun daerah, berkoordinasi dan bekerjasama dengan Pemerintah Pusat.
 11. upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah desa, guna mengatasi hambatan dalam meningkatkan pasar pemasaran kelompok usaha kripik yaitu dengan mengajukan penganggaran untuk terlaksana diklat, rekrutmen, pemberian motivasi dari Kepala desa.
 12. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah desa, guna mengatasi hambatan dalam mencari informasi untuk kelompok usaha kripik adalah mencari informasi baik daerah maupun pusat dalam mengembangkan hasil produksi.
 13. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah desa, guna mengatasi hambatan dalam dalam memberikan advokasi kebijakan yang berpihak pada ekonomi rakyat dengan memberikan perlindungan advokasi pada kelompok usaha.
 14. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah desa, guna mengatasi hambatan dalam membuat kebijakan ekonomi pada masyarakat desa melalui perlindungan hukum dan pembuatan PERDES.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi pihak pemerintah desa Putrapinggang Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran dalam Pemberdayaan kelompok usaha kripik adalah: Ketersediaan anggaran, SDM atau pegawai, sarana prasarana, minat perhatian dan sebagainya. Hasil observasi menunjukkan bahwa koperasi unit desa sebagai sumber keuangan yang memberikan pinjaman kepada kelompok usaha, tidak mampu memenuhi permintaan selueuh kelompok. Hasil wawancara diketahui bahwa Ketersediaan anggaran, SDM atau pegawai, sarana prasarana, minat perhatian menjadi faktor utama yang menyebabkan terhambatnya program pemberdayaan masyarakat.
 3. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam pelaksanaan pemberdayaan kelompok usaha kripik oleh Pemerintah Desa di Desa Putrapinggang Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran, berdasarkan hasil observasi adalah: (1) Dilakukannya pengajuan anggaran; (2) Diikutsertakan pada kegiatan diklat, pendidikan latihan dan bimbingan teknis, (3) Mendatangkan narasumber dari luar dinas melalui kerjasama atau koordinasi dengan pemerintan pusat agar diikutsertakan dalam pelatihan yang dilaksanakan dan dibiayai oleh pusat; (4) Adanya pengajuan alokasi biaya. Sementara hasil wawancara diketahui keempat hal tersebut telah dilaksanakan

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pemberdayaan kelompok usaha kripik oleh Pemerintah Desa Putrapinggang Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan melalui: pemberian pelatihan, pendidikan, pendampingan pemberian izin. Hasil observasi menunjukkan bahwa proses pemberian pelatihan, pendidikan, pendampingan pemberian izin, telah dilaksanakan dengan cukup baik. Sementara itu hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa pemberian pelatihan, pendidikan, pendampingan pemberian izin telah dilaksanakan dengan baik.

Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka saran penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pelaksanaan pemberdayaan kelompok usaha kripik oleh Pemerintah Desa di Desa Putrapinggang Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran perlu terus ditingkatkan baik melalui diklat maupun non diklat sesuai dengan langkah-langkah pemberdayaan kelompok usaha kripik oleh Pemerintah Desa, melalui pendidikan, pelaksanaan pelatihan baik di dalam organisasi maupun di luar organisasi.
2. Pemerintah desa hendaknya lebih meminimalisir hambatan seperti anggaran/dana, SDM, dengan cara mencari

MODERAT

Modern dan Demokratis

investor asing yang memiliki dana besar agar dapat membantu kelompok usaha.

- Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa perlu terus ditingkatkan mengingat sangat penting dalam menunjang tercapainya pemberdayaan kelompok usaha keripik oleh Pemerintah Desa di Desa Putrapinggian Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran. Utuk mengoptimalkannya dengan cara membuat jadwal yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Alma, Buchari. 2001. *Psikologi Industri dan Organisasi*. Jakarta: Pustaka Setia
- Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bennis & Mische. 1995. *Aplyying Empowerment. Organization Model*. Career development international, Vol.3. No. 2, pp.82-7
- Hatta, Moh. 2010. *Koperasi di Indonesia*. Bandung: Gramedia
- Kartasasmita. 1957. *Pemberdayaan Masyarakat Sebuah Tinjauan Administrasi*. Jakarta: CIDES.
- Mardikanto, Totok & Subianto, Poerwoko. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dalam perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nawawi, Hadari. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang Kompetitif*. Cetakan Pertama, penerbit UGM, Yogyakarta.
- Nazir. 2003. *Metode penelitian*. Bandung: Gramedia
- Prijono-Pranaka. 1996. *Pemberdayaan (empowerment), Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: Centre for strategic and international studies.
- Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No.27) tentang Koperasi
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumadyo. 2001. *Kemandirian petani*. Bogor: IPB
- Sumaryadi. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama.
- Surakhmad. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Alfabeta.
- Umar, Husen. 2002. *Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi Cetakan Ketujuh*. Jakarta: Gramedia Pustaka.

Dokumen-Dokumen

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang *Perkoperasian*

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang *Perkoperasian*

UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang *Desa*

UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan* yang di dalamnya mencantumkan tanggungjawab sosial dan lingkungan oleh penanam modal/perseroan

PP Nomor 22 tahun 2010 tentang *Desa*

PP Nomor 72 tahun 2005 tentang *Desa*

Perdes Nomor 11 tahun 2013 tentang *Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa*

Error! Hyperlink reference not valid.) tanggal akses 25 Maret 2015

(http://UKM.blogspot.com/2012/01/Usaha-kecil-mencengah-dalam_11.htmlv)

(Error! Hyperlink reference not valid.)

[http://eprints.uny.ac.id/8538/3/BAB% 202%20-%2020084 01244022. pdf](http://eprints.uny.ac.id/8538/3/BAB%20202%20-%202008401244022.pdf)) tanggal akses 28 Maret 2015